

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DALAM
MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DI KELURAHAN SUNGAI PAGAR
KECAMATAN KAMPAR KIRI KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2016**

Oleh : Septiani Putri Winata

Email : Septianiputriwinata02@gmail.com

Pembimbing : Dr. Muchid, S.sos, M.Phil

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293-Telp/Fax.
0761-63277

Abstract

Institute Tertasatanatan is a collective organizational implementer representing organizations in and out, in carrying out the task of community empowerment in the village / kelurahan responsible to Village Deliberation / Village. The Village Innovation Institution is also the lowest organization in the organizational structure as the implementer of the community empowerment policy at the village / kelurahan level so that the board is required to have the knowledge and skills and positive attitude especially in carrying out its duties and functions in community empowerment. However, when viewed from the activities of each institution in the village of the river has not been running in accordance with the objectives of its formation, has not run things that are encouraging. The purpose of this research is to know the role of Community Empowerment Institution in Community Empowerment in Sungai Pagar Village Kampar Kiri Subdistrict of Kampar Regency and to know the inhibiting factor of Community Empowerment Institution in Community Empowerment in Sungai Pagar Village Kampar Kiri Sub-district Kampar Regency. When viewed from its type, this research belongs to qualitative research. The results of the research show that the role of Community Empowerment Institution in Community Empowerment in Sungai Pagar Village Kampar Kiri Subdistrict Kampar Regency as Facilitator, Mediator, Motivator and Dinamisator get different result which the role of LPM Sungai Pagar Urban Village has not done its job according to LPM reference. Inhibiting factors The role of Community Empowerment Institutions Village in Community Empowerment in Sungai Pagar Village Kampar Kiri Subdistrict Kampar District is the lack of human resources and the ability of human resources and the absence of sources of funds that can stimulate motivation and provide opportunities LPMK board to work.

Keywords : Role , Community empowerment, LPMK

Pendahuluan

Salah satu aspek yang penting dalam melaksanakan fungsi pemerintahan adalah pembangunan dengan berbagai aktivitasnya dan untuk itulah pemerintah membentuk sistem birokrasi dari pemerintahan yang tinggi sampai ke tingkat pemerintahan yang terendah agar dapat menggerakkan seluruh potensi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Untuk mewujudkan itu semua maka dibutuhkan sumber daya aparatur pemerintah yang handal dan mampu bekerja secara efektif dan efisien sehingga dapat menjalankan organisasi birokrasi pemerintahan serta administrasi pembangunan untuk mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. ([http// www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com))

Pembangunan masyarakat berkaitan dengan pengembangan berbagai aktifitas kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kehidupan masyarakat kota yang heterogen dan selalu berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat cenderung kearah modernisasi, yang ditandai oleh sikap kritis masyarakat, menuntut pemerintah untuk lebih tanggap dalam menanggapi berbagai persoalan, sehingga keberadaannya di mata masyarakat menjadi lebih Legitimate. Hal ini dapat diasumsikan bahwa semakin meningkatnya kualitas hidup manusia dalam berbagai aspek kehidupan akan membutuhkan upaya pembangunan dan pembaharuan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut pemerintah harus memperbaiki dan menyempurnakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, terutama melalui pelaksanaan otonomi daerah yang ada di setiap daerah.

Sejalan dengan hal diatas, LPMK memiliki tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Dalam menjalankan tugasnya, LPMK memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

4. Penyusunan rencana, pelaksanaan pelesatiran dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat.
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Pagar merupakan salah satu lembaga yang menjalankan tugas tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

Pada pasal 21 menjelaskan bahwa tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yaitu:

1. Tugas
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
 - b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
2. Fungsi
 - a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa/kelurahan
 - b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan
 - c. Pengkoordinasian lembaga kemasyarakatan
 - d. Perencanaan kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu
 - e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di desa/kelurahan.

Sejalan dengan hal diatas, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Sungai Pagar dibentuk berdasarkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Terbentuk berdasarkan Keputusan Lurah Sungai Pagar Nomor 411.2/PMD/KSP/2013/070. Adapun fungsi

dari LPM sendiri adalah: menanam dan pemupukan rasa persatuan, mengkoordinasikan perencanaan pembangunan, penggali dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Maksud pembentukan Asosiasi LPM adalah untuk lebih meningkatkan kemampuan lembaga pemberdayaan Masyarakat dalam memecahkan masalah kelembagaan serta pembangunan organisasi yang mandiri, sejalan dengan tuntutan dan tantangan masyarakat serta memfasilitasi

kepentingan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan bahwasannya LPMK Kelurahan Sungai Pagari dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 belum menunjukkan aktifitas-aktifitas yang jelas dan nyata dari tugas organisasi kemasyarakatan tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Program Kerja Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sungai Pagar

Nama organisasi Kemasyarakatan	Program kerja	Keterangan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Terbentuk berdasarkan Keputusan Lurah Sungai Pagar Nomor 411.2/PMD/KSP/2013/070	1. Menggerakkan partisipasi swadaya masyarakat 2. Perencanaan pembangunan kelurahan	Tidak ada program yang berjalan karena tidak adanya pembanguan yang berjalan di Kelurahan Sungai Pagar

Sumber : Dokumen Pertanggungjawaban Kinerja organisasi kemasyarakatan Kelurahan Sungai Pagar, 2016

Berdasarkan tabel 1 terlihat bahwasannya Pada lembaga pemberdayaan masyarakat, dari kedua program kerja yang dibuat, tidak ada satupun program kerja tersebut yang terlaksana. Baik itu menggerakkan partisipasi swadaya masyarakat maupun melakukan perencanaan pembangunan di Kelurahan Sungai Pagar tersebut. Bahkan sampai saat ini LPMK tersebut hampir dikatakan tidak aktif karena tidak ada kegiatan-kegiatan yang nyata dilakukan oleh LPMK Sungai Pagar tersebut.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar**”.
Rumusan Masalah.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka dapat dirumuskan masalah yaitu Bagaimana Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016?

Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

Penelitian dilakukan oleh Aji Budiono, dengan judul “Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Pembangunan Daerah Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (Studi Analisis Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merjosari Kota Malang Tahun 2013)”. Penelitian ini mengkaji sisi kepemimpinan Lurah Merjosari kota Malang tahun 2013 terkait: Strategi pembangunan daerah dari sisi partisipasi pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK). Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dimana peniliti mencari narasumber yang dinilai paham kondisi pembagunan daerah di wilayah Kelurahan Merjosari. Hasil penelitian ini peran Lurah Merjosari dalam pembangunan meliputi kegiatan sosialisasi dan publikasi kepada masyarakat melauai kegiatan dalam kewenangan formal maupun nonformal seperti shalat jumat, tahlilan, upacara, momen perkumpulan masyarakat. Pembangunan identitas masyarakat Merjosari mejadi dasar bagi rasa kepemilikan masyarakat Merjosari sehingga antusiasme partisipasi pemberdayaan masyarakat menjadi

dominan serta didukung oleh kepemilikan pengelolaan aset secara mandiri oleh LPMK kelurahan Merjosari.

2. Kerangka Teori

a. Konsep Peranan

Berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia, peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Menurut Soejono Soekanto (2012:212), menjelaskan pengertian peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Soejono Soekanto (2012:213) peranan mencakup dalam tiga hal yaitu :

- 1) Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Norma-norma tersebut secara sosial di kenal ada empat meliputi :
 - a) Cara(Usage); lebih menonjol di dalam hubungan antarindividu dalam masyarakat. Suatu penyimpangan terhadapnya tak akan mengakibatkan hukuman yang berat, akan tetapi hanya

sekedar celaan dari individu yang dihubunginya.

- b) Kebiasaan (folkways), sebagai perbuatan yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama merupakan bukti bahwa orang banyak menyukai perbuatan tersebut.
 - c) Tata kelakuan (mores), merupakan cerminan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas, secara sadar maupun tidak sadar, oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya.
 - d) Adat istiadat (custom), merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat dapat meningkatkan kekuatan mengikatnya menjadi custom atau adat istiadat. Soejono Soekanto (2012:174).
- 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 - 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Perilaku individu adalah aktivitas seorang atasan dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pemotivasian dan pengendalian untuk mengambil keputusan tentang kecocokan antar individu, tugas pekerjaan dan efektivitas.

Keputusan tersebut dipengaruhi oleh ciri atasan dan bawahan yang dipengaruhi oleh perilaku individu. Ada 4 ciri utama individu, yaitu:

- 1) Persepsi (perception) adalah proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh individu.
- 2) Sikap (attitude) adalah kesiapsiagaan mental yang diorganisasikan melalui pengalaman yang memiliki pengaruh tertentu terhadap tanggapan seseorang terhadap orang, obyek, dan situasi yang berhubungan dengannya.

- 3) Kepribadian adalah serangkaian ciri yang relatif mantap, kecenderungan dan perangai yang sebagian besar dibentuk oleh faktor keturunan dan oleh faktor-faktor sosial, kebudayaan dan lingkungan.
- 4) Belajar adalah proses terjadinya perubahan yang relatif tetap dalam perilaku sebagai akibat dari praktek. (Siswanto, 2012:76).

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah suatu kompleks penghargaan seseorang terhadap cara menentukan sikap dan perbuatan dalam situasi tertentu berdasarkan atas kedudukan sosial tertentu.

b. Konsep Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2012; 243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh.

c. Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Pembahasan tentang pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari keberadaan peranan Organisasi Non-Pemerintah atau NGO (Non Governmental Organizations) yang tersebar baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun internasional. Menurut UNDP, NGO meliputi organisasi atau kelompok yang kegiatannya antara lain di bidang

pengembangan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, peningkatan mutu dan taraf hidup rakyat, advokasi dan pemberdayaan masyarakat (Onny,2006: 97).

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencakup 3 (tiga) hal, yaitu :

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- 2) Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat
- 3) Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (role). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran, (Miftah Thoha, 2012; 98).

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran

adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

d. Konsep Peran Lembaga Kemasyarakatan

Menurut Onny (2006: 103-104), peran lembaga kemasyarakatan dalam proses memberdayakan rakyat di Indonesia dilakukan melalui tiga pendekatan sebagai berikut.

- 1) Pendekatan kemanusiaan, walaupun tidak memberdayakan masyarakat sebagai kelompok sasarannya, tetapi dapat memberdayakan NGO itu sendiri. Tujuan pendekatan ini adalah membantu secara spontan dan sukarela kelompok masyarakat tertentu yang membutuhkan bantuan karena terkena musibah, atau kurang beruntung. Pendekatan ini terutama dilakukan oleh lembaga penyandang dana (grantmaking atau fundaring institute) seperti Yayasan Dana Gotong Royong.
- 2) Pendekatan pengembangan masyarakat, bertujuan mengembangkan, memandirikan, dan menswadayakan masyarakat seperti dilakukan oleh Dian Desa dan Yayasan Indonesia Sejahtera (YIS) yang merintis Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yang kemudian menjadi salah satu program pemerintah. Yayasan Sosial Tani Membangun (YSTM), merintis Usaha Bersama, kemudian mendirikan Yayasan Bina Swadaya yang menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi tenaga NGO dan pemerintah yang berkecimpung di bidang pengembangan masyarakat.
- 3) Pendekatan pemberdayaan rakyat, bertujuan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Caranya adalah dengan melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah seperti

dilakukan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH), Solidaritas Perempuan, dan Indonesia NGO Forum on Indonesia (INFID).

e. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan mulai tampak ke permukaan sekitar dekade 1970-an dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (akhir abad ke-20). Kemunculan konsep ini hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi dan personalisme. Disusul kemudian dengan gelombang pemikiran neo-marxisme, freudianisme, termasuk didalamnya aliran-aliran strukturalisme dan sosiologi kritik frankfurt. Bermunculan konsep-konsep seperti elit, kekuasaan, anti kemapanan, gerakan populis, anti struktur, legitimasi, ideologi, pembebasan dan civil society.

Menurut Noeng Muhadjir (2008; 63) dalam visi pemberdayaan masyarakat semua masalah dan cita kemasyarakatan menjadi tugas masyarakat dan semua masalah kesejahteraan warga masyarakat dipecahkan dan diatasi sendiri oleh masyarakat. konsep pemberdayaan (empowerment), mengandung niat dan visi bahwa yang kuat bukan melemahkan yang lemah, melainkan membantu agar masing-masing dapat mandiri dan berkembang menuju keunggulan. Motivasi untuk mandiri dan menjadi unggul terutama harus tumbuh dari dalam, bukan tumbuh karena bantuan pihak lain, kerja keras berprestasi dan upaya belajar berkelanjutan untuk mandiri dan upaya menjadi unggul perlu menjadi bagian dari kehidupan setiap anak bangsa.

Menurut Edi Suharto (2005;57-60) apabila pemberdayaan dilihat dari faktor tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan maka dapat diketahui antara lain:

- 1) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

- 2) Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan nama orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan dan mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- 3) Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali melalui perubahan struktur sosial.
- 4) Pemberdayaan adalah suatu cara dengan dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

f. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mubyarto, orang miskin harus diberdayakan, dibangun dari ketidakberdayaan, dan kata kunci bagi mereka adalah keberdayaan, keswadayaan dan kemandirian (Mubyarto, 2006: 82). Kemandirian tersebut bukan hanya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, akan tetapi dapat tumbuh dan berkembang dengan kemampuan atau kekuatan sendiri. Memberdayakan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dalam kondisi yang tidak mampu agar dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan (Gunawan, 2006: 6).

Upaya memberdayakan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut.

“Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi

(daya) masyarakat pada berkembang. Pemberdayaan itu sendiri berarti upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi (daya) yang dimiliki masyarakat (empowering) dengan langkah-langkah atau cara yang positif dan nyata, memberikan input kepada masyarakat, dan membuka akses terhadap sumber daya yang tersedia dengan memberi peluang-peluang kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Ketiga, memberdayakan masyarakat berarti pula lemah dan harus dilakukan pencegahan agar tidak bertambah lemah”. (Gunawan, 2006: 67-68)

g. Konsep Organisasi.

Menurut Syafiie (2011;12)

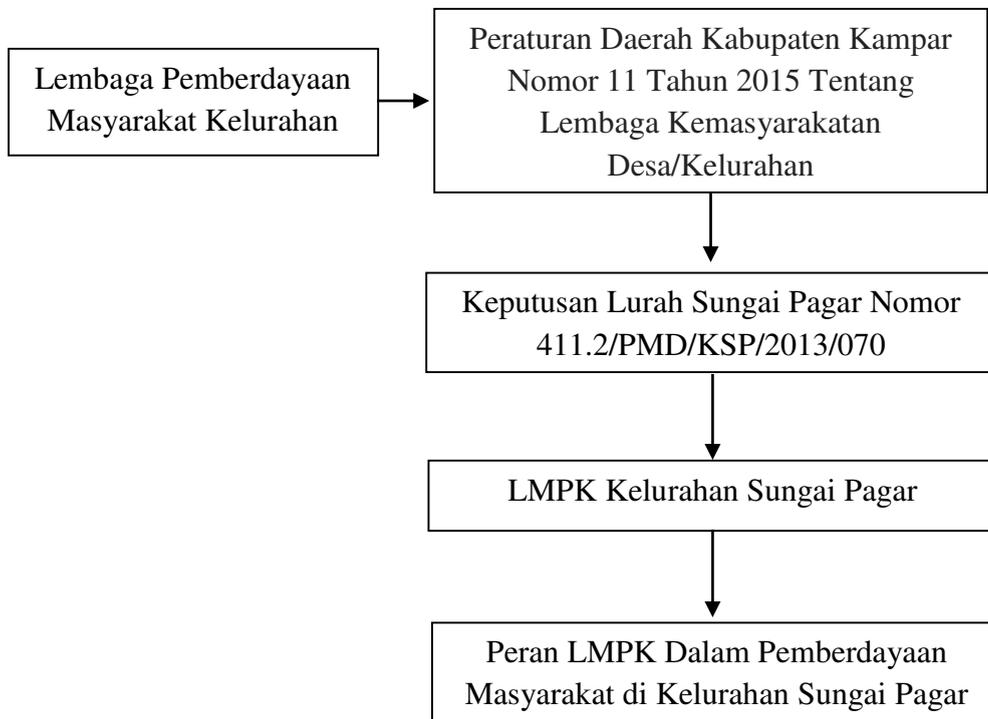
Organisasi dapat disimpulkan :

- 1) Wadah atau tempat terselenggaranya administrasi
- 2) Di dalamnya terjadi berbagai hubungan atas individu maupun kelompok baik dari organisasi itu sendiri maupun ke luar organisasi
- 3) Terjadi proses dan pembagian tugas
- 4) Berlangsung proses aktivitas berdasarkan kinerja masing-masing

Kerangka Pemikiran

Setelah mengemukakan beberapa teori tentang variabel yang akan diteliti, perlu dijelaskan landasan yang akan dilakukan dengan membuat kerangka berpikir diukur dengan mengambil beberapa teori yang dijadikan indikator / parameter serta fenomena yang terjadi.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran Tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016



Metode Penelitian

Untuk mendapatkan jawaban terhadap masalah yang diteliti penulis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu suatu upaya sistematis untuk melakukan penelitian yang dimulai dari pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu alat untuk melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada suatu fenomena sosial atau hukum

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Dimana dalam penelitian kualitatif yang akan

dilakukan ini tentang Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah pada kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Adapun informan penelitian dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkompeten untuk memberikan informasi yang berjumlah 3 orang. Adapun seluruh informan tersebut dapat dilihat pada tabel 2 berikut :

Tabel 1.2
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Lurah	1
2	Ketua LPMK	1
3	Tokoh Masyarakat	1
Jumlah		3

Sumber : Data Olahan Tahun 2016

Teknik Analisa data

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik

pengumpulan data, wawancara dan dokumentasi terkait dengan masalah Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam

Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016. Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, maka penulis memilihnya menurut jenis dan data yang diperoleh sesuai dengan fenomena sosial untuk dianalisa dan disimpulkan berdasarkan teori yang ada.

Hasil Penelitian

1. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Tahun 2016

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam menampung dan menonjolkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Lembaga ini berkedudukan di kelurahan dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat lokal dimana pengurusannya terdiri dari komunitas masyarakat, dibentuk dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, dijelaskan pada pasal 10 bahwa pembentukan lembaga kemasyarakatan di kelurahan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat. Tujuan pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Secara umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat menyiapkan sarana seperti penyediaan:

a. Kotak Saran

Dalam upaya mempermudah, menampung segala aspirasi, keluhan maupun saran dari masyarakat, pihak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) menggunakan pola penyediaan kotak saran atau pengaduan. Kotak saran merupakan tempat

menampung surat berupa usulan dan saran bagi masyarakat. Dengan adanya kotak saran diharapkan agar masyarakat juga mau menyampaikan aspirasi. Langkah ini merupakan bentuk komitmen kelurahan

Untuk menyukseskan program pembangunan di kelurahan. Setiap aspirasi masyarakat maupun keluhan dari warga masyarakat melalui kotak saran tersebut akan ditampung oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dan diperhatikan sebagaimana mestinya. Meskipun kotak saran yang akan disediakan bersifat terbuka kepada masyarakat secara luas, namun warga yang menyampaikan keluhan maupun saran akan dirahasiakan identitasnya terhadap pelayanan dan pembangunan di Kelurahan.

b. Rapat

Salah satu bentuk menampung aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dengan mengadakan rapat bersama setiap kepala lingkungan kelurahan. Rapat adalah pertemuan atau berkumpulnya minimal 2 orang lebih untuk membahas apa yang dibutuhkan dan memutuskan suatu tujuan yang ingin dicapai.

Peran dari lembaga pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar tersebut bisa kita lihat dari beberapa indikator pembahasan yang akan diuraikan oleh peneliti. Adapun indikator yang diuraikan berdasarkan fungsi dan perannya yaitu : Lembaga pemberdayaan sebagai fasilitator, lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai mediator, lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai motivator dan lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai dinamistator bagi pembangunan di Kelurahan tersebut. Berikut ini beberapa uraian indikator yang menjadi pembahasan untuk mengetahui seberapa besarnya peran LPM di Kelurahan Sungai Pagar:

a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Fasilitator

Peran lembaga pemberdayaan masyarakat yang disebut sebagai fasilitator di Kelurahan tersebut adalah LPM sendiri memfasilitasi segala aktivitas masyarakat yang menyangkut dengan program pembangunan LPM. Selain sebagai fasilitator dalam program pembangunan masyarakat, LPM sendiri merupakan sebagai pendamping terhadap perangkat-perangkat kelurahan seperti RT dan RW. Adapun peran yang dijalani oleh LPM di Kelurahan Sungai Pagar yang di lihat dari mata kasar, sudah terlihat sebagai fasilitator dalam rancangan pembangunan masyarakat. Untuk dapat menjadikan fasilitator yang baik berikut ini peneliti akan mengkajikan beberapa sub indikator .

Masyarakat yang ikut merencanakan pembangunan pada masing-masing desa merupakan bentuk tanggungjawab masing-masing desa untuk menumbuhkan rasa peduli tentang program yang akan dilaksanakan di desa mereka demi tercapainya pembangunan di segala bidang, baik pembangunan bersifat fisik maupun bidang nonfisik. Masyarakat diboleh untuk ikut merencanakan pembangunan yang akan dilaksanakan Kelurahan dan mereka harus bisa bertanggungjawab dengan program yang telah mereka ajukan dalam Musrenbang tingkat Kelurahan dan seterusnya.

b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Mediator

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan yang dianggap sebagai mediator dalam pembangunan yaitu LPM sendiri yang memiliki tugas untuk mensosialisasikan beberapa hasil usulan dari rencana pembangunan yang sudah ditetapkan dan akan dijadikan pembangunan jangka menengah kepada warga masyarakat. Untuk LPM Kelurahan Sungai Pagar sendiri mensosialisasikan rancangan pembangunan pada saat melakukan pertemuan-pertemuan yang nantinya akan diambil beberapa menit untuk mensosialisasi program-program pembangunan tersebut. Adapun hal yang

menjadi penghambat dari program tersebut biasanya dikarenakan faktor dari geografis

c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Motivator

Motivator merupakan orang atau kelompok yang mampu membuat orang lain untuk bisa melakukan sesuatu. Didalam LPM sangat dibutuhkan motivator yang bisa mendorong masyarakat yang ada di Kelurahan untuk bisa melakukan apa yang bisa mereka lakukan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri yang sesuai keinginan masyarakat. Sehingga tantangan untuk LPM Kelurahan Sungai Pagar sendiri merupakan cara membentuk para motivator-motivator pemberdayaan masyarakat yang bisa memotivasi masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar.

d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagai Dinamisator

Mengoptimalkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat LPM seharusnya lebih bijaksana dalam memantau serta melihat berbagai kegiatan-kegiatan serta program yang ada di lingkungan masyarakat. Selain harus bijaksana pemantauan kegiatan masyarakat, LPM juga diharapkan untuk bisa menempatkan dirinya ditengah masyarakat dan mendorong masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam program-program yang dibuat oleh LPM. Layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi serta lain-lainnya, sudah mulai LPM berikan. Meskipun tidak belum maksimal namun sudah ada perhatian dari LPM untuk pendidikan mereka memberikan bantuan beasiswa dengan cara memasukan proposal kebeberapa instansi dan bank-bank yang ada di Kelurahan Sungai Pagar. Beasiswa tersebut akan diberikan kepada siswa yang berprestasi dan tidak mampu. Adapun pengawasan yang diperlukan untuk mengawasi perencanaan program yang berbentuk pembangunan. Dengan adanya pengawasan dari pihak lain selain LPM akan memperkecil dampak

negatif yang mungkin saja akan timbulkan dikemudian harinya

2. Faktor penghambat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua LPMK Sungai Pagar mengenai penghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah

- a. Kurangnya sumber daya manusia di LPMK Sungai Pagar. Fakta yang ada bahwa kepengurusan LPMK tidak efektif, yang cenderung aktif dan menonjol hanya ketua LPMK saja. Hal ini juga dapat mengindikasikan kecenderungan tidak efektifnya kepemimpinan internal LPMK.
- b. Sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan kinerja LPMK di kelurahan Sungai Pagar

Hal diatas selaras dengan pendapat Robbins (1996; 8) yang menyatakan bahwa kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau ability, motivasi atau dan kesempatan atau kinerja. Berdasarkan hasil penelitian didapati fakta bahwa LPMK Sungai Pagar dalam hal ability (kurangnya SDM dan Kemampuan SDM) serta tidak adanya sumber dana yang dapat merangsang motivasi dan memberikan kesempatan pengurus LPMK untuk berkarya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Konsep peranan LPM pada penelitian ini menurut Soerjono Soekanto: merupakan aspek dinamis dari kedudukan. Pada penelitian ini analisa mengacu pada indikator penelitian, lalu indikator ini di analisa sebagai mana pada bab IV sehingga dapat ditarik kesimpulan:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam memberdayakan Masyarakat di

Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- a. Fasilitator; masih rendahnya partisipasi masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan dan penentuan prioritas yang diadakan oleh LPM.
 - b. Mediator; kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghadiri rapat serta memberikan informasi bagi berjalannya program.
 - c. Motivator; dilihat dari segi pemanfaatan masyarakat terhadap pembangunan yang ada. Akan tetapi bertolak belakang dengan keadaan masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar dalam segi merawat atau menjaga pembangunan yang ada.
 - d. Dinamisator; dilihat dari pengawasan dan pemantauan yang LPM lakukan masih kurang maksimal.
2. Faktor penghambat Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Dalam Memberdayakan Masyarakat di Kelurahan Sungai Pagar Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah kurangnya SDM dan Kemampuan SDM serta tidak adanya sumber dana yang dapat merangsang motivasi dan memberikan kesempatan pengurus LPMK untuk berkarya.

Saran

1. Diharapkan kepada LPM agar dapat memfasilitasi pembangunan dengah lurah. Dalam perencanaan anggaran pada musrenbag.
2. Diharapkan kepada LPM agar dapat meningkatkankinerjanya lagi, dan lebih kreatif lagi dalam menarik minat masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam perancangan program.
3. Diharapkan kepada LPM agar lebih mampu meningkatkan kesadaran dan kepedulian

masyarakat untuk menjaga, merawat pembangunan yang ada, agar pembangunan tersebut dapat bertahan lama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

Edi Suharto, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Gunawan, 2006, *Genius Learning Strategy*, PT. Gramedia, Jakarta.

Miftah Thoha, 2012, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, Jakarta, Kencana.

Mubyarto, 2006, *Ilmu-ilmu Sosial Dasar Konsep, Posisi, Program Pasca*, Bandung

Noeng Muhadjir, 2008, *Kebijakan dan Perencanaan Sosial*, Rake Sarasin, Yogyakarta.

Onny, 2006, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta, CSIS.

Siswanto, 2012, *Hukum Pemerintah Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sunar Grafika.

Soejono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta

Syafie, 2011, *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*, Refika Aditama, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Keputusan Lurah Sungai Pagar Nomor 411.2/PMD/KSP/2013/070. Tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

C. Jurnal

Aji Budiono, *Peran Kepemimpinan Lurah Dalam Pembangunan Daerah Melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) (Studi Analisis Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Merjosari Kota Malang Tahun 2013)*, Jurnal, Malang, 2013.